



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI

(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN/BASARNAS

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 21 Agustus 2024
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 15.00 WIB s.d 17.55 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Membahas Evaluasi APBN TA 2024 sampai dengan Bulan Agustus 2024; 2. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2023; 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	: H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 15.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR hari ini adalah Membahas Evaluasi APBN TA 2024 sampai dengan Bulan Agustus 2024, Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2023 dan lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri PUPR untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, dimana capaian per 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

KEMENTERIAN	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
Kementerian PUPR	41,72 %	49,25 %

2. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian opini tersebut di tahun mendatang.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk:
 - a. Mempercepat realisasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan hasil kesimpulan rapat tanggal 30 Agustus 2023 dan 7 September 2023;
 - b. Melaksanakan percepatan realisasi Inpres Jalan Daerah serta Inpres Air Minum dan Air Limbah Tahun 2024;
 - c. Memprioritaskan pengusaha lokal dalam pelaksanaan proyek konstruksi di daerah;
 - d. Meningkatkan program operasi, optimalisasi dan rehabilitasi untuk memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan.
4. Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR sepakat untuk bersama-sama memprioritaskan anggaran Rp. 3 Triliun (tiga triliun rupiah) sebagai tambahan untuk program padat karya selambat-lambatnya akhir Agustus 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.55 WIB.

Jakarta, 21 Agustus 2024

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,**

ttd

M. BASOEKI HADIMOELJONO

KETUA RAPAT,

ttd

ANDI IWAN DARMAWAN ARAS